

PERUBAHAN SOSIAL MENURUT PANDANGAN MANHAJ TARBIYAH

Sueb

Dosen DPK pada Politeknik TEDC

Email: poltek_tedc@yahoo.com

Abstrak

Perubahan merupakan suatu proses dari satu tahap ke tahap berikutnya, untuk itu diperlukan suatu program perencanaan dan strategi yang handal dan usaha yang terus menerus. Perubahan melalui gerakan sosial bukanlah aktivitas sesaat tetapi aktivitas yang mengandung tujuan untuk kebaikan bersama serta kepentingan seluruh rakyat. Tidak salah bahwa dalam gerakan pada umumnya bersanding pada prinsip bahwa: 1) Perubahan bukanlah hadiah dari seorang penguasa melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan, 2) gerakan akan menuju kearah yang lebih baik dari hari ini, 3) sesuatu bentuk perlawanan atau perwujudan sikap menolak atau melawan terhadap sesuatu yang dipandang merugikan, 4) aksi gerakan tanpa aksi tidak mungkin tercapai tujuan yang diharapkan. Faktor utama yang dapat menentukan perubahan sosial adalah berupa "dorongan untuk berubah". Ada tujuh (7) langkah dalam urutan perubahan: 1) Ketidakpuasan yang berasal dari kegagalan dalam mencapai tujuan, 2) kekacauan psikis dalam bentuk berbagai reaksi emosional dan aspirasi yang tidak tepat dilihat dari sudut penyelesaian masalah, 3) penggunaan energy yang dikeluarkan semakin rasional dalam upaya menyadari maksud dari system nilai yang ada, 4) tingkat perumusan gagasan, 5) upaya menetapkan ide-ide institusional khusus yang akan dilaksanakan, 6) pelaksanaan perubahan oleh individu atau kelompok, 7) rutinitas perubahan. Perubahan sosial menurut pandangan manhaj tarbiyah beranggapan bahwa suatu masyarakat akan berubah manakala mengikuti system yang ada dan ikut andil untuk merubah sesuatu manakala "manhaj tarbiyah sudah masuk di dalam suatu system." Hal ini dapat kita amati melalui usaha dalam pendirian suatu partai sehingga dapat melakukan aksi: pertama, keterlibatan dalam pemilihan umum, kedua melibatkan unsur internal dan eksternal, ketiga memasukkan ide-ide pokok perjuangan. Untuk lebih jelasnya bahwa perubahan suatu masyarakat diawali dari teori "pembentukan pribadi" akan membentuk sebuah "keluarga" yang harmonis dan baik, sehingga akan terbentuk "masyarakat" yang tertib dan damai, menuju "sebuah Negara" yang sejahtera dan akhirnya terbentuk "era kejayaan" yang sesuai dengan nilai dan norma suatu fitrah manusia yang hakiki.

Kata Kunci: Perubahan sosial, Gerakan, Manhaj, Tarbiyah.

1. PENDAHULUAN

Perubahan sosial dari dahulu sampai sekarang terus terjadi, sehingga kita harus memikirkan bagaimana perubahan sosial itu terjadi. Gerakan untuk perubahan sosial ini merupakan aktivitas yang seharusnya bermanfaat pada semua pihak yang terlibat. Perubahan sosial jangan dianggap sebagai hadiah dari penguasa tetapi kita harus memperjuangkannya sehingga terjadi perubahan yang menuju kearah yang lebih baik. Dorongan untuk mengubah sikap terhadap sosial yang lebih baik membutuhkan suatu kepuasan hati nurani. Masyarakat memiliki pandangan bahwa perubahan sosial itu akan terjadi jika ada panutan yang bisa diandalkan pada suatu system kehidupan.

Kunci utama dalam perubahan sosial ini adalah bagaimana membentuk pribadi seseorang sehingga dia dapat berubah.

Anggapan dasar dari Ginsberg bahwa faktor-faktor perubahan dilandasi; Keinginan-keinginan secara sadar dan keputusan para pribadi; Sikap tindakan pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah; Perubahan struktural dan halangan struktural; Pengaruh-pengaruh eksternal; Pribadi-Pribadi dan kelompok-kelompok yang menonjol; Unsur unsur yang bergabung menjadi Satu; Peristiwa-peristiwa tertentu; Munculnya tujuan bersama.

Setiap Perubahan merupakan Proses dari satu tahap ke tahap berikutnya. Oleh karena itu diperlukan suatu Program perencanaan dan strategi yang handal dan usaha yang terus menerus, tidak goyah atau putus asa. Setiap gerakan bukan aktivitas sesaat, gerakan adalah aktivitas yang bertujuan dan untuk kebaikan bersama serta kemaslahatan semua rakyat.

Sebagai Acuan ada empat prinsip gerakan yang dikemukakan oleh Mahardika (2000:158), Pertama, perubahan tidak pernah merupakan hadiah dari penguasa, melainkan sesuatu yang harus direbut atau diperjuangkan. Kedua, salah satu tahap atau bagian dari usaha-usaha perubahan menuju keadaan yang lebih baik dan bermakna. Ketiga, Sesuatu bentuk perlawanan, perwujudan sikap menolak atau melawan terhadap sesuatu yang dipandang merugikan. Keempat aksi dan jalan kearah perubahan merupakan suatu kesatuan, aksi tanpa makna bila tanpa arah perubahan mendasar tidak akan mungkin tercapai tanpa suatu aksi.

Perjuangan tidak luput dari suatu rintangan atau hambatan baik datang dari luar maupun datang dari dalam itu sendiri. Terkadang gerakan dengan tuntutan perubahan dianggap suatu yang menyiksa dan merupakan suatu perkosaan terhadap keadaan normal yang sedang berjalan secara harmoni. Faktor lain yang merintangai perubahan adalah sistem sertifikasi komunitas, kepentingan

terselubung dan bahkan pola kebudayaan mesin (Lauer, 2001:12). Untuk itu perlu diperhatikan syarat-syarat keberhasilan suatu perubahan melalui gerakan adalah : persiapan matang , kekuatan ini yang dipimpin, militan dan berani, adanya pendukung yang jelas dapat menambah teman dan bukan menambah lawan. Selain itu gerakan harus merumuskan muatan aksi dengan ciri, yakni : alasannya jelas, tidak mengada-ada, tuntutan yang wajar, mudah dipahami massa pendukung, sasaran jelas dan tepat (Mahardika, 2000: 163).

Menurut teori perubahan sosial Durkheim yang disumbangkan oleh Nisbet ada empat perkara penting : Pertama, Perkara asal usul, Bagaimanakah keadaan asal-usul masyarakat maju abad sekarang ini ? Kedua, tingkat-tingkat perkembangan sosial, Ketiga, Mengenai faktor penyebab sosial. Keempat, arah perubahan sosial. Perubahan yang di organisir oleh gerakan sosial Manhaj Tarbiyah sebenarnya menganut konsep gerakan yang bersifat evolusioner untuk program kerja jangka panjang, sekalipun untuk program jangka pendek gerakan Manhaj Tarbiyah dapat berkoalisi dengan organisasi lain mengadakan suatu perubahan secara demonstratif. Untuk program jangka panjang Manhaj Tarbiyah mengadakan gerakan secara Evolusi, yakni terstruktur dan berjenjang. Konsep ini sejalan dengan perspektif Fungsional Struktural yang dikemukakan oleh Berghe bahwa perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi di luar sistem, pertumbuhan melalui diferensi, dan melalui penemuan-penemuan internal (Lauer, 2001 : 106)

Faktor yang menentukan perubahan sosial menurut Smelser adalah telah dikenal sebagai satu atau beberapa diantara perkara yakni: keadaan struktur untuk berubah, dorongan untuk berubah, mobilisasi untuk berubah dan pelaksanaan control sosial. Selanjutnya Smelser menemukan tujuh langkah dalam urutan perubahan: Pertama, ketidakpuasan yang berasal dari kegagalan mencapai tujuan yang memuaskan dan dari kesadaran tentang kemungkinan perubahan. Kedua, kekacauan psikis dalam bentuk berbagai reaksi emosional dan aspirasi yang tidak tepat dilihat dari sudut penyelesaian masalah. Ketiga, penggunaan energy yang dikeluarkan semakin rasional dalam upaya menyadari maksud dari sistem nilai yang ada. Keempat, tingkat perumusan gagasan, dimana ide-ide dibangkitkan secara berlimpah tanpa seorangpun mau bertanggung jawab atau memikul akibatnya. Kelima, upaya menetapkan ide-ide Institusional Khusus yang akan dilaksanakan. Keenam, Pelaksanaan perubahan oleh individu atau kelompok dan pelaksanaannya diberi sesuai dengan nilai yang ada. Ketujuh, rutinisasi perubahan yang dapat diterima (Lauer, 2002 : 121).

2. KETERTARIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM

Harapan dari Manhaj Tarbiyah Khususnya umat Islam di Indonesia sebagai Penduduk mayoritas, tidak lagi menjadi masyarakat yang tertindas dan terbebas dari kebodohan yang membelenggu selama ini. Untuk itu penyadaran akses masyarakat

di bidang politik menjadi sangat *urgent*. Wadah politik yang sesuai dengan ajaran Islam adalah cita-cita luhur yang sebenarnya telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta.

Melalui Kepartaian inilah umat Islam memiliki wadah politik yang dapat menyalurkan aspirasinya diantaranya melalui pemilihan umum sebenarnya merupakan agenda Negara dan menjadi hajat rakyat, tetapi ketika dakwah ini hadir ditengah rakyat dan bertujuan untuk memperbaiki Negara dan kesejahteraan rakyat, maka pemilihan umum menjadi agenda penting dalam kegiatan dakwah. Untuk itu ketika dakwah peduli pada rakyat dan Negara, maka dakwah harus peduli pada setiap hal yang mempengaruhi kehidupan rakyat. Ketika umat Islam adalah bagian mayoritas dari rakyat, maka pemilu menjadi urusan umat.

Partisipasinya dalam pemilu pada dasarnya sebagai upaya merealisasikan konsep kemenyeluruhan ajaran Islam, menghentikan meluasnya permusuhan dan perselisihan di berbagai tingkat kehidupan, memunculkan potensi yang masih tersimpan untuk semakin membuka peluang-peluang dakwah, memantau langkah-langkah musuh, persiapan awal untuk memasuki mihwar dauli (orbit kenegaraan dalam dakwah). Sebagai ajang latihan amal dalam menghadapi berbagai tantangan. Peluang untuk melakukan mobilisasi umum. Mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan bagaimana memosisikannya dalam dakwah. Sebagai sarana penyebaran kader-kader untuk memberikan pandangan-pandangan yang memuaskan kepada masyarakat dengan pandangan masa depan yang lebih baik. Sebagai langkah penyebaran dakwah di segenap aspek kehidupan.

Pemilu dan tarbiyah merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Pertama pendidikan politik memiliki banyak jalan bentuknya seperti pelatihan politik, advokasi politik, aksi-aksi demonstrasi, diskusi, pendampingan masyarakat, pengajian-pengajian dan sebagainya.

Kedua, Pendidikan politik tidak hanya pada saat kampanye saja, tetapi dilakukan secara terus menerus dan terprogram. Ketiga, Pendidikan politik ditempatkan pada bingkai pendidikan Islam. Keempat, kebutuhan akan tarbiyah politik tidak terbatas pada umat dan rakyat. Lebih penting dan mendasar, dakwah ini secara sistematis dan efektif menjalankan *tarbiyah* politik.

Pemilu - dakwah - kepemimpinan adalah merupakan sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Untuk mensukseskan pemilihan umum perlu penyadaran kepada semua lapisan masyarakat apa cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, maka dakwah merupakan sarana untuk pemberdayaan umat termasuk dalam pelaksanaan pemilu dimana saran dari pemilu adalah pemilihan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat. Produk dari pemilihan umum adalah terpilihnya seorang pemimpin sesuai dengan tuntutan masyarakat pada saat ini dan menjadi pengantar untuk kehidupan dimasa yang akan

datang. Oleh karena itu Siddiq (2003) menyebutkan bahwa pemimpin memiliki fungsi orientasi, dimana masyarakat dan Negara memiliki orientasi yang akan menuntun kemana ia akan bergerak dan menuju, fungsi kebijakan, kepemimpinan merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan, undang-undang dan menjalankan untuk mencapai tujuan masyarakat atau Negara, fungsi strategi dan manajemen, tugas pemimpin Negara adalah mewujudkan kemakmuran berdasarkan pengolahan segala sumber daya yang tersedia dan di kembangkan, fungsi hukum, sebagai penjaga kebaikan dalam hidup dan kehidupan suatu masyarakat atau Negara dan interaksi dalam kehidupan harus diikat dengan hukum yang jelas, tegas dan bersumber pada hukum yang Allah turunkan.

Fungsi lain dari pemimpin adalah penyelesaian konflik, penyelesaian konflik adalah salah satu tugas pemimpin. Pemimpin yang baik dalam menyelesaikan konflik tidak didasarkan pada otoritas dan kekuatan yang dimilikinya, bersandar pada kemampuannya untuk mengembalikan orientasinya pihak-pihak yang berkonflik kepada Allah dan rosulnya dan fungsi pertahanan dan keamanan, keamanan merupakan indikator kehidupan masyarakat yang baik, serta fungsi hubungan, yakni hubungan antar masyarakat dan Negara yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemaslahatan bersama.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai wadah politik untuk mengantarkan sejumlah kader dakwah ke panggung dakwah parlemen. Partisipasi dalam pemilu setidaknya dalam rangka merealisasikan konsep kemenyeluruh ajaran Islam, menghentikan meluasnya permusuhan dan perselisihan di baerbagai tingkat kehidupan, memunculkan potensi yang masih tersimpan untuk semakin membuka peluang-peluang dakwah, memantau langkah-langkah musuh, persiapan awal untuk memasuki mihwar dauli (orbit kenegaraan dalam dakwah) . Sebagai ajang latihan amal dalam menghadapi berbagai tantangan. Peluang untuk melakukan mobilisasi umum. Mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan bagaimana memposisikan dalam dakwah. Sebagai sarana penyebaran kader-kader untuk memberikan pandangan.-pandangan yang memuaskan masyarakat dengan pandangan masa depan yang lebih baik dan sebagai langkah penyebaran dakwah di segenap aspek kehidupan.

3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN MANHAJ TARBIIYAH

Islam memandang politik "sebagai bagian dirinya, dia mengurus akidah, Ibadah, politik, ekonomi dan lain-lain" (wawancara dengan Ustadz TQ). Untuk itu Ustadz TQ menyatakan lebih lanjut bahwa Pandangan Islam terhadap politik adalah Negara bertanggung jawab untuk mengurus masyarakat. Telah di contohkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW bahwa dia meninggal sebagai kepala Negara. Unggul akidahnya, unggul akhlakunya, apalah artinya apabila negaranya

dijajah. Oleh karena itu memandang politik sama dengan memandang Negara.

Bila kita kaji selintas antara partai keadilan sejahtera (PKS) dengan Manhaj Tarbiyah sebagai gerakan sosial yang bermafas Islam nampak tidak ada hubungan sama sekali, dan susah untuk membuktikan ketertarikannya yang satu dengan yang lain. Namun apabila kita kritis dalam memahami dari konsep dakwah dan gerakannya, kedua institusi itu jelas terkait.

Yang bersangkutan menyatakan : "Keterkaitan Partai Keadilan Sejahtera dari sisi visi dan misi pengkaderan ada kemiripan teks dan aktualisasi dalam berbagai kegiatan seperti pengajian (*halaqoh*). Sesuai dengan pendapat Ustadz (OMD, pengamat penulis. Yang bersangkutan menyatakan: "ketertarikan Partai Keadilan dengan Manhaj Tarbiyah adalah salah satu bukti keberhasilan dari dakwah melalui gerakan sosial". Negara merupakan suatu mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Komitmen dari kader-kader Manhaj Tarbiyah adalah seberapa banyak dana, tenaga dan jiwa yang dapat dikorbankan terhadap jamaah, bukan seberapa banyak seseorang dapat menerima keuntungan dari Jamaah. Sejalan apa yang dikatakan dengan Utadz TDN, dalam wawancara, menyatakan : "partai keadilan sejahtera adalah sangat erat hubungannya dengan aktivitas *halaqoh* dari Manhaj Tarbiyah.

Begitu juga Ustadz YW, dalam wawancara, menyatakan : "*halaqoh* telah berkontribusi terhadap partai keadilan sejahtera". Partai sebagai wahana publik yang mampu mencapai tujuan-tujuan politik. Salah satunya jalan yang paling efektif untuk mengantarkan kader-kader yang islami dalam bernegara adalah partai politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam proses pengkaderan mengambil referensi dari Imam Hasan Al Bana, menurut Ustdaz TDN dalam wawancara, menyatakan : "memang Manhaj Tarbiyah dengan partainya yakni : Partai Keadilan Sejahtera pada dasarnya mengacu pada konsep Ikhwani Muslimin". Sedangkan Ustadz TQ, wawancara, menyatakan : "Manhaj Tarbiyah yang menganut konsep Islam yang *syamil* (menyeluruh) dan *universal* selalu mempedomani Manhaj (sistem) yang di contohkan oleh Rosullullah SAW. Sehingga Ustadz AZ, dalam wawancara, menyatakan : "bagi organisasi yang mencontoh *Riusalah Nabawiyah* akan Nampak banyak kesamaan atau persis sama".

Ketertarikan antara pengkaderan pada Manhaj Tarbiyah dengan pengkaderan yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera, sekurang-kurangnya dapat dilihat dari sisi sumber daya manusianya bahwa semua kader dari Partai keadilan sejahtera adalah tokoh dari Manhaj Tarbiyah. Hal tersebut di atas dapat kita kaji dari prinsip dan kebijakan partai keadilan sejahtera tercermin sebagai partai dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhanya dan dakwah yang di tujukan kepada semua umat manusia, jauh dari bentuk bentuk rasialisme dan fanatisme kekuasaan, rasa atau etnisitas. Ustad TQ dalam wawancara

menyatakan: "Partai Keadilan Sejahtera adalah orang-orang Manhaj Tarbiyah, karena partai sebelumnya tidak ada yang pas untuk menyalurkan aspirasi, maka jalan yang terbaik adalah membuat partai yang dapat membina keluarga, masyarakat dan Negara secara Islami."

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar prinsip dan setiap kebijakan

Politik Sebagai berikut :

- 1) *Al-syumuliyah* (lengkap dan integral), setiap kebijakan partai selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, memandangnya dari berbagai perspektif dan mensinkronkan antara yang satu dengan yang lainnya.
- 2) *Al-Islah* (Reformatif), setiap kebijakan, secara Individual, masyarakat termasuk pemerintah dan Negara, dalam rangka meninggikan kalimat Allah memenangkan syariatnya dan menegakan daulahnya.
- 3) *Al-Syar'iyah* (Konstitusional), hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah dan antara hubungan diri sendiri dan orang lain. Ketundukan dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya.
- 4) *Al-Wasath* (Moderat), masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "Tengah" (*ummatan wasatha*), symbol moralitas masyarakat islam melahirkan perilaku, sikap dan watak moderat.
- 5) *Al-Istiqamah* (Komit dan Konsisten), berpegang teguh kepada ajaran dan aturan islam merupakan ciri seorang muslim, maka komitmen dan konsisten kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. *Al-Numuw wa al-tathawwur* (tumbuh dan berkembang, pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal, harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. *Al-Tadarruj wa Al-Tawazun* (Bertahap seimbang dan proporsional), pertumbuhan dan perkembangan gerakan dakwah partai meski dilalui secara bertahap dan proporsional,
- 6) sesuai dengan *ssunnatullah* yang berlaku di jagat raya ini.
- 7) *Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah* (Skala prioritas dan prioritas Kemanfaatan), efektifitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan dalam menentukan
- 8) prioritas langkah dan kebijakannya. Segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. *Al-Musaqbalah* (orientasi masa depan), masa lalu, masa kini, dan masa mendatang merupakan realitas yang saling berhubungan. Sasaran Dakwah yang sangat besar yakni tegaknya agama Allah di bumi dan berdirinya *Daulah Islamiyah 'Alamiyah* dalam Sistem *Khalifah Islamiyah*, bias jadi yang menikmati keberhasilannya adalah generasi

mendatang. *Al-Alamiyah* (bagian dari dakwah sedunia), gerakan dakwah Islamiyah, tujuan atau sasarnya yang akan dicapai bersifat *v'alamiyah* (mendunia) sejalan dengan universitas Islam, tidak kenal batas etnisitas, Negara atau daerah tertentu

4. MANHAJ TARBIYAH DAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM

Manhaj Tarbiyah membawa misi dakwah yang bersih dan suci, artinya bersih dari ambisi pribadi, bersih dari kepentingan dunia dan bersih dari hawa nafsu, mengibarkan kebenaran yang telah digariskan Allah SWT dalam firman-Nya. Pengamatan terhadap Ustadz (OMD), beliau menegaskan bahwa implementasi Manhaj Tarbiyah dalam dakwahnya yang dinyatakan Al-Bana (2000 ; 29) sebagai berikut:

"kami ingin berterus terang kepada semua orang tentang tujuan kami memaparkan dihadapan mereka metode kami, dan membimbing *niereta* menuju dakwah kami. Disini tidak ada yang samara atau remang-remang, semuanya terang bahkan lebih terang dari sinar matahari, lebih jelas dari cahaya fajar, dan lebih benderang dari putihnya siang".

Relevansinya pernyataan di atas, Ustadz YW, dalam wawancara, menyatakan : "dalam usaha penegakan syariat Islam ada langkah bertahap secara internal dan eksternal". Adapun yang dimaksud dengan langkah internal yakni membentuk kader-kader yang saleh secara pribadi, keluarga dan sosial. Langkah eksternal melalui pembuatan opini tentang indahnya syariat islam, yang direalisasikan melalui media massa, khutbah, dakwah, tabligh dan lain-lain. Syariat Islam diimplementasikan secara maksimal yang mampu dilaksanakan saat ini, tanpa menunggu undang-undang, Al-Qur'an menjadi pedoman, tetapi yang berkaitan dengan legalitas Negara dilakukan secara bertahap.

Untuk itu Kader gerakan sosial Manhaj Tarbiyah selalu berpedoman kepada slogan semangat jiwa Islam untuk membentuk Masyarakat Islam yang lebih baik, sebagaimana diuraikan oleh tim Raudhatul Jannah (1421 H : 113) Yakni : (1). Mengeleminir sistem partai, dan mengarahkan orientasi politik bangsa pada suatu arah barisan, (2). Perbaiki undang-undang dan sistem peradilan dalam semua cabangnya, sehingga sesuai dengan syariat Islam, (3). Memperkuat angkatan bersenjata, membimbing kelompok-kelompok remaja dan meningkatkan semangat mereka untuk berjihad di jalan Allah, (4). Memperkuat hubungan antar Negara Islam, (5). Menanamkan jiwa Islam di kantor-kantor pemerintahan, sehingga setiap pegawai dituntut untuk melaksanakan ajaran Islam, (6). Mengadakan Kontrol tingkah laku pribadi terhadap karyawan, dan meniadakan pemisahan antara sikap pribadi dan sikap kerja, (7). Menyusun jadwal kerja di kantor-kantor, pada waktu liburan, sehingga dapat membantu terlaksananya berbagai tugas dan untuk menghilangkan sikap malas, (8). Menumpas segala bentuk korupsi pungutan liar atau nepotisme dalam penerimaan pegawai, (9). Menyesuaikan jadwal kerja pemerintahan dengan

hukum dan ajaran Islam. Peraturan perayaan, pertemuan resmi, undangan, rumah sakit, penjara dan sebagainya sehingga tidak bertentangan dengan waktu shalat.

Menurut WSN dalam wawancara, menyatakan "Islam telah menggariskan bahwa hidup seseorang Muslimin harus menjalankan ajaran Islam secara totalitas, karena Islam telah memberikan tuntutan bagi kehidupan seorang muslim baik urusan ibadah maupun urusan *muamalah* (pemiagaan) dan politik tidak bisa dilepaskan dari keduanya. Oleh karena itu *halaqoh* sebagai sarana dalam mensosialisasikan ajaran Islam dan mendidik politik yang islami sebagaimana Rosullullah SAW mendidik sahabat sebelum memegang amanah kenegaraan didik terlebih dahulu tentang kehidupan berpolitik secara Islami".

Memperjuangkan syariat Islam adalah "segala aturan Allah SWT yang telah diturunkan yang terdiri dari aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Hukum potong tangan adalah bagian kecil dari muamalah" (wawancara dengan Ustadz Tq). Sebagai Konsekuensinya sebagai seorang muslim dalam hidup dan kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan syariat Islam. Implementasi penegakan syariat Islam pada Manhaj Tarbiyah melalui partai Keadilan Sejahtera yang berzakat islam, artinya Manhaj Tarbiyah dengan PKS-nya benar-benar bertujuan untuk menegakan syariat Islam bukan menegakan Partai. Untuk menegakan syariat Islam melalui langkah-langkah diantaranya pembentukan pribadi yakni pengkokohan *aqidah*, pembentukan keluarga yang islami, menciptakan masyarakat yang islami, yakni membentuk kader-kader yang telah masuk di lembaga legislative dan selanjutnya ditingkat konstitusi memiliki payung dalam menegakan syariat islam. Bahkan pada tingkat seni, seperti nasid bagian dari syariat Islam.

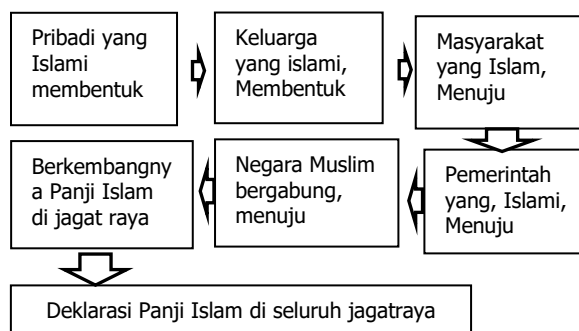
Tujuan pembinaan untuk ditingkat pribadi, yakni membentuk individu yang memiliki karakteristik : lurus aqidahnya, bersih dari kemusyrikan benar ibadahnya, kokoh akhlaknya, terasah akal pikirannya, kuat tubuhnya, mampu berusaha mencari rizki, mengendalikan hawa nafsunya, menjaga waktunya agar tidak terbuang percuma, teratur dalam segala urusannya berguna untuk orang lain.

Instrumen lain dalam Manhaj Tarbiyah dan partai keadilan sejahtera sebagai upaya pengangkatan Syariat Islam melalui kegiatan : Pertama, *mutabaah* (pemantauan) aktifitas harian, artinya setiap individu dipantau segala aktifitasnya, misalnya bagaimana pelaksanaan puasa sunah, shalat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran secara rutin. Kedua, memakai busana muslimah setiap kader *akhwat* (perempuan) dan istri-istri dari kader Manhaj Tarbiyah pasti memakai busana muslimah sebagai salah satu bagian dari syariat Islam. Ketiga, *ukhuwah Islamiyah* (silaturahmi dan pengajian) merupakan bagian Kegiatan rutin pengajian. Sebagai upaya untuk mengukuhkan persaudaraan dan menghindari perpecahan.

Keempat, menolak korupsi sebagai bukti konkrit melaksanakan syariat islam secara nyata.

Melalui *halaqoh* (pengajian rutin) Manhaj Tarbiyah diharapkan semua aktivis dapat: mengorientasikan sistem nilai yang positif dalam menerapkan hukum-hukum syariat islam diatas kehidupan, menjadikan hukum-hukum syariat islam sebagai parameter untuk menerima atau menolak sesuatu. Menerapkan hukum Islam dan orientasinya dengan benar, meyakinkan bahwa Islam mampu membangun masyarakat muslim yang kuat dan kokoh. Berinteraksi dengan berbagai perubahan zaman dan problematikanya, memahami undang-undang Islam dan memajami hukum-hukum waris serta penerapannya. Kemampuan diatas diharapkan dapat diimplementasikan yang dimulai dari konsep pribadi, keluarga, masyarakat dan Negara. Manhaj Tarbiyah yang menganut konsep Islam *yang syamil* (menyeluruh) pada dasarnya mengacu terhadap model teori Perubahan Sosial, penulis dalam gambar dibawah ini Yakni:

Gambar 1. Tahapan Perubahan



5. Kesimpulan

Perubahan sosial diperlukan untuk menuju masyarakat yang kehidupannya lebih baik menurut penerapan syariat Islam. Menerapkan syariat Islam dalam segala tataran kehidupan yang dimulai dari kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berorganisasi, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Pelaksanaan syariat Islam ini dapat dilakukan dengan pembentukan pribadi dengan membentuk kader-kader yang telah masuk di lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan sosial membentuk individu yang memiliki karakteristik Islami sehingga terjadi perilaku jujur, bertanggung jawab, taat pada hak dan menjauhi perbuatan maksiat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, April. Juni 2001. Sabili Nomor 26 tahun VIII : *Dosa-dosa politik Soekarno terhadap Umat Islam – Mengkritik Peringatan 100 tahun soekarno 6 juni 1901 – 6 juni 2001*. Jakarta : PT Bina Media Sabili.
- [2] Arifin, Syamsul. 2000. *Merembah Jalan Baru Dalam Beragama*. Yogyakarta: IYTTAQA Press.
- [3] Al-Bana, Hasan. 1986. *Imbauan Kami* (Penerjemah Ki Agus MS Agustijik). Jakarta: Yayasan Bina Umat.
- [4] -----, 2001 *Risalah pergerakan ikhwanul muslimin*, Jilid 1 dan 2 (Penerjemah Anis

- matta, Rofi Munawar, Wahid Ahmadi). Solo : Era Intermedia.
- [5] Al-Wakil, Muhamad Sayyid 2001. *Pengkaderan Islam Terbesar Abad ke 14 H, Studi Analisis terhadap Manhaj gerakan Ikhwanul Muslimin* (Alih Bahasa Fachrudin). Bandung : Asyamil Press.
- [6] Aziz, Jum'ah Amin Abdul. 2002. *Tsawabit dalam manhaj Gerakan Ikhwan* (Alih Bahasa tate Qomarudin). Bandung : PT Syamil Cipta Media.
- [7] Beliharz, Peter. 2002. *Teori-teori Sosial – Observasi Kritis terhadap para Filosof terkemuka* (Alih Bahasa Sigit Jatmiko). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [8] Bruinessen, Martin Van. 1999. *NU – Tradisi Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (diterjemahkan oleh Farid Wajidi). Yogyakarta Damanik, Ali Said. 2002. *Fenomena Partai Keadilan*. Jakarta : Teraju.
- [10] Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori sosial Modern – Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkhem dan Max weber* (Penerjemah Soeheba Kramadibrata). Jakarta UI Press.
- [11] Hilal, Syamsu. 2002 *Gerakan Da'wah Formal di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna.
- [12] Hoffer, Eric. 1993 *Gerakan Massa* (Penerjemah Masri Maris), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- [13] Jary, David; Jary, Julia. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. Great Britain (British) : Horfer Collins Publisher.
- [14] Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern jilid I dan II* (di Indonesiakan oleh Robert M Z Lawang). Jakarta : PT Gramedia.
- [15] Lauer, Robert H. 2001. *Perspektif tentang perubahan Sosial* (Penerjemah Alimanda Jakarta : PT Rineka Cipta.
- [16] Mahardika, Timur.. 2000. *Gerakan Massa-Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan secara damai*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.
- [17] Mahmud, Ali Abdul Halim, 1999. *Prangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin* (Penerjemah wahid Ahmadi, Fakhruddin Nursyam, Khizin Abu Faqih). Solo : Era Intermedia.
- [18] Maliki, Zainuddin., 2000. *Agama Rakyat – Agama Penguasa, Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*. Yogyakarta : Galang Press.
- [19] Markoff, Jhon. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia* (Penyunting dan Pengantar Heru Nugroho, Penerjemah Ari Setyaningrum). Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Buku Asli Th, 1996.
- [20] Masyur, Musthofa. 2000. *Islam adalah Solusi Jawaban atas Tuduhan* (Penerjemah Nandang Burhanudin). Jakarta : Kalifa Press.
- [21] -----, 2000. *Tujuh tahapan Dakwah Fardiyah* (Penerjemah Hamim Thohari). Jakarta : Al-I'tishom.
- [22] Muiz, Abdul; Wibowo BS, Alyuni, DH et all.. 2002. *Tarbiyah Menjawab Tantangan*. Jakarta : Departemen Kaderisasi DPP Partai Keadilan.
- [23] Nashir, Header. 2000. *Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta : Bayu Indra Grafika.
- [24] Qomarudin, Tate. 2003. *Jalan Agen Perubahan*. Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna.
- [25] Rais, Amin; Ma'arif, Syafei; Abdullah, Amin et.al.. 1996. *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah*, Lembaga Pustaka Dokumentasi PP Muhammadiyah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [26] Rahardjo, Bambang, Syamsulhadi. 1995. *Garuda Emas Pancasila Sakti*. Jakarta : Yayasan PETA Pusat.
- [27] Ritzer, George. 2000. *Sociological Theory*, Fifth Edition. New York : Me Grow Hill Companies.
- [28] Robertson, Roland. 1986. *Sosiologi Agama* (Alih Bahasa paul Rusyadi). Jakarta : Aksara Persada.
- [29] Soekanto, Soerjo. 1983. *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- [30] Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi – Proses dan Pospek dalam sebuah Dunia yang sedang berubah* (Penyunting dan Pengantar Tadjudin Noer Effendi, Alih Bahasa I Made Krisna). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Buku Asli diterbitkan Th. 1993.
- [31] Takariawan, Cahyadi 2003. *Rekayasa Masa Depan menuju Kemenangan Dakwah Islam*. Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna.
- [32] Tim Raudhatul Jannah. 1421 H. *Manhaj Tarbiyah Islamiyah – Paduan Pembinaan Kader-Kader Islam dan Dakwah Buku A dan B*. Jakarta : Diterbitkan oleh Kalangan Sendiri.
- [33] Usman Sunyoto. 2003 *Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat Yogyakarta* : Pustaka Pelajar.
- [34] Wahono, Untung; Sulaeman, Eman. 2002. *Pandangan Ulama Ikhwan terhadap partai politik*. Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna.
- [35] Wamy. 1993. *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran* (Penerjemah A. Najiyulloh, Penyunting bAbu Ridha). Jakarta : Al-Ishlahy Press.
- [36] Zeitlin, Irving M. 1995. *Memahami kembali Sosiologi – Kritik terhadap Teori Sosiologi Konterporer* (Penyunting Sunyoto Usman, Penerjemah bAnshori, Juhanda). Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Buku Asli diterbitkan Tahun 1973